

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh dana pihak ketiga, *Non Performing Financing*, dan Inflasi terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016 sampai 2018. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan musyarakah dan variable independen adalah dana pihak ketiga, *Non Performing Financing*, dan inflasi.

Di Indonesia bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya sedikit terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Bila pada periode 1992-1998 hanya ada satu unit Bank Syariah, maka pada tahun 2009, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 6 Bank Umum Syariah.

Perkembangan BUS dan UUS hingga pertengahan tahun 2019 terus menampakan angka yang signifikan. Tercatat ada 14 Bank Umum Syariah yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**

**Daftar Bank Umum Syaiah dan Unit Usaha Syariah Tahun 2019**

No.	Bank Umum Syariah
-----	-------------------

1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank BRISyariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7.	PT. Bank BNI Syariah
8.	PT. Bank Syariah Mandiri
9.	PT. Bank Mega Syariah
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11.	PT. Bank Syariah Bukopin
12.	PT. BCA Syariah
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14.	PT. Bank Maybank Syariah Indonesia

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Juni 2019<sup>1</sup>

Pada tabel 4.1 diketahui bahwa jumlah kantor untuk Bank Umum Syariah hingga pertengahan tahun 2019 tercatat ada sebanyak 1894 yang tersebar di seluruh Indonesia. Peningkatan jumlah BUS tersebut menunjukkan perkembangan yang pesat pada industri perbankan syariah serta mencerminkan besarnya peningkatan minat masyarakat terhadap jasa perbankan syariah.

Meskipun tahun berdiri setiap bank tidaklah sama namun untuk melakukan penelitian dengan menggunakan laporan keuangan di tiga tahun terakhir ini dari keempatbelas bank tersebut memiliki data yang lengkap dan melaporkan ke OJK sehingga peneliti dapat mengaksesnya. Kelengkapan data dari empatbelas bank ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya maka berikut ini adalah deskripsi dari objek penelitian.

#### 1. PT. Bank Aceh Syariah

PT. Bank Aceh merupakan hasil perubahan nama yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009, dan juga disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank ini juga memulai aktivitas

---

<sup>1</sup> Statistik Perbankan Syariah Juni 2019, dalam : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/datadan-statistik/statistik-perbankansyariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx>, diakses 20 April 2020, pukul 15.50 WIB.

perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin pembukuan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank melakukan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Saat ini BAS mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 26, Kantor Cabang pembantu sebanyak 89 dan Kantor Kas sebanyak 27.<sup>2</sup>

## 2. PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah

Bank Pembangunan Daerah NTB adalah Bank Milik Pemerintah Propinsi NTB bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Nusa Tenggara Barat. Bank NTB Syariah didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 5 Juli 1964. Saat ini BPD NTB mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 13, Kantor Cabang pembantu sebanyak 22 dan Kantor Kas sebanyak 4.<sup>3</sup>

## 3. PT. Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk berdiri pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Saat ini BMI mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 82, Kantor Cabang pembantu sebanyak 152 dan Kantor Kas sebanyak 57.<sup>4</sup>

## 4. PT. Bank Victoria Syariah

PT. Bank Panin Syariah telah mendapatkan izin operasi sebagai bank syariah berdasarkan pada SK Gubernur BI No.12/8/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 10 Februari 2010. Akan tetapi baru beroperasi secara penuh sebagai Bank Umum Syariah pada 1 April

---

<sup>2</sup> [http://www.bankaceh.co.id/?page\\_id=82](http://www.bankaceh.co.id/?page_id=82), diakses pada 20 April 2020 pukul 15.34

<sup>3</sup> <https://www.bankntbsyariah.co.id/Perusahaan/tentangBankNTBSyariah/sejarah-bank-ntb-syarah>, diakses pada 20 April 2020 pukul 15.35

<sup>4</sup> <https://www.bankmuamalat.co.id/>, diakses pada 20 April 2020, pukul 15.37

2010. Saat ini BVS mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 9, Kantor Cabang pembantu sebanyak 5 dan tidak mempunyai Kantor Kas.<sup>5</sup>

#### 5. PT. Bank BRISyariah

PT Bank BRISyariah (persero) Tbk. Mengakuisisi Bank Jasa Arta pada tanggal 9 Desember 2007 dan mendapat izin dari Bank Indonesia 16 Oktober 2008 melalui suratnya 0.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka tanggal 17 Nopember 2008 PT Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Saat ini BRIS mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 50, Kantor Cabang pembantu sebanyak 205 dan Kantor Kas sebanyak 12.<sup>6</sup>

#### 6. PT. Bank Jabar Banten Syariah

Sesuai izin BI No.2/18/DpG/DPIP tanggal 12 April 2000, sejak tanggal 15 April 2000 Bank Jabar menjadi Bank Pembangunan Daerah pertama di Indonesia yang menjalankan dual banking system. Tanggal 29 November 2007 nama perseroan berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dengan sebutan Bank Jabar Banten. Tanggal 5 Juli 2010, perseroan telah resmi menjadi Bank BJB. Saat ini BJB Syariah mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 9, Kantor Cabang pembantu sebanyak 55 dan Kantor Kas sebanyak 2 kantor.<sup>7</sup>

#### 7. PT. Bak BNI Syariah

Berdasarkan pada Undang-Undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Dalam corporate plan UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah

---

<sup>5</sup> <https://bankvictoriasyariah.co.id/page/sub/profil>, diakses pada 20 April 2020, pukul 15.39

<sup>6</sup> <https://www.brisyariah.co.id/dashboard.php?idp=2abbacaa01f2a4f9960ba8603dd1591d>, diakses pada 20 April 2020 pukul 15.41

<sup>7</sup> <http://bjbsyariah.co.id/profil>, diakses pada 20 April 2020 pukul 15.45

sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Saat ini BNI Syariah mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 68, Kantor Cabang pembantu sebanyak 203 dan Kantor Kas sebanyak 16 kantor.<sup>8</sup>

#### 8. PT. Bank Syariah Mandiri

Disahkan melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior BI No.1/1/KEP.DGS/1999. BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Saat ini BSM mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 129, Kantor Cabang pembantu sebanyak 426 dan Kantor Kas sebanyak 55.<sup>9</sup>

#### 9. PT. Bank Mega Syariah

Perjalanan dari PT Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional yang bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Tepatnya tanggal 25 Agustus 2004 PT Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan pada tanggal 23 September 2010 nama badan Hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT Bank Mega Syariah. Saat ini BMS mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 27, Kantor Cabang pembantu sebanyak 33 dan Kantor Kas sebanyak 8.<sup>10</sup>

#### 10. PT. Bank Panin Dubai Syariah

PT Bank Panin Syariah berdiri dan mulai melaksanakan usahanya dengan prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari BI berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai Bank Syariah pada tanggal 2 Desember 2009. Saat ini BPS mempunyai jumlah

---

<sup>8</sup> <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/>, diakses pada 20 April 2020 pukul 15.48

<sup>9</sup> <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/sejarah>, diakses pada 20 April 2020 pukul 15.49

<sup>10</sup> <http://www.megasyariah.co.id/>, diakses pada 20 April 2020 pukul 15.57

Kantor Cabang sebanyak 14, Kantor Cabang pembantu sebanyak 4 dan tidak mempunyai Kantor Kas.<sup>11</sup>

#### 11. PT. Bank Syariah Bukopin

Bank Syariah Bukopin mulai beroperasi dengan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari BI pada tanggal 27 Oktober 2008. Pada tanggal 10 Juli 2009 melalui surat persetujuan BI, PT Bank Bukopin Tbk telah mengalihkan hak dan kewajiban usaha syariahnya kedalam PT Bank Syariah Bukopin. Saat ini BSB mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 12, Kantor Cabang pembantu sebanyak 7 dan Kantor Kas sebanyak 4.<sup>12</sup>

#### 12. PT. Bank BCA Syariah

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari BI berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian secara resmi beroperasi sebagai Bank Syariah pada tanggal 5 April 2010. Saat ini BCA Syariah mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 14, Kantor Cabang pembantu sebanyak 11 dan Kantor Kas sebanyak 17 kantor.<sup>13</sup>

#### 13. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpendek yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera. Saat ini BTPN Syariah

---

<sup>11</sup> <https://www.paninbanksyariah.co.id/index.php/mtentangkami/pemberitahuan>, diakses pada 20 April 2020 pukul 15.58

<sup>12</sup> <https://www.syariahbukopin.co.id/id/tentang-kami/profil-perusahaan>, diakses pada 20 April 2020 pukul 15.58

<sup>13</sup> <https://www.bcasyariah.co.id/profil-korporasi/sejarah/>, diakses pada 20 April 2020 pukul 15.59

mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 24, Kantor Cabang pembantu sebanyak 2 dan tidak mempunyai Kantor Kas.<sup>14</sup>

#### 14. PT. Maybank Syariah Indonesia

Pendirian PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) berawal pada Januari 1995 yaitu beroperasinya Bank Joint Venture Indonesia Malaysia pertama, PT Maybank Indocrop. Tahun 2010 PT Bank Maybank Indocrop menjadi bank syariah komersial dan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah). Berdasarkan persatuan BI tertanggal 23 September 2010, Maybank Syariah mulai kegiatan usaha sebagai bank syariah pada Oktober 2010. Saat ini Maybank Syariah mempunyai jumlah Kantor Cabang sebanyak 1, dan tidak mempunyai Kantor Cabang pembantu dan Kantor Kas.<sup>15</sup>

## B. Deskripsi Data

### 1. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga yaitu dana yang dipercaya oleh masyarakat kepada bank berbentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>16</sup> Dana pihak ketiga yang ada di bank syariah merupakan dana yang telah dititipkan oleh masyarakat kepada pihak bank dalam bentuk tabungan, deposito dan giro yang selanjutnya bisa digunakan untuk operasional bank syariah dalam bentuk penyauran pembiayaan kepada masyarakat. Semakin besar porsi dana yang disimpan masyarakat pada bank maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh bank dan juga semakin meningkatnya porsi pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah, karena dana ini sangat diandalkan oleh bank syariah.

---

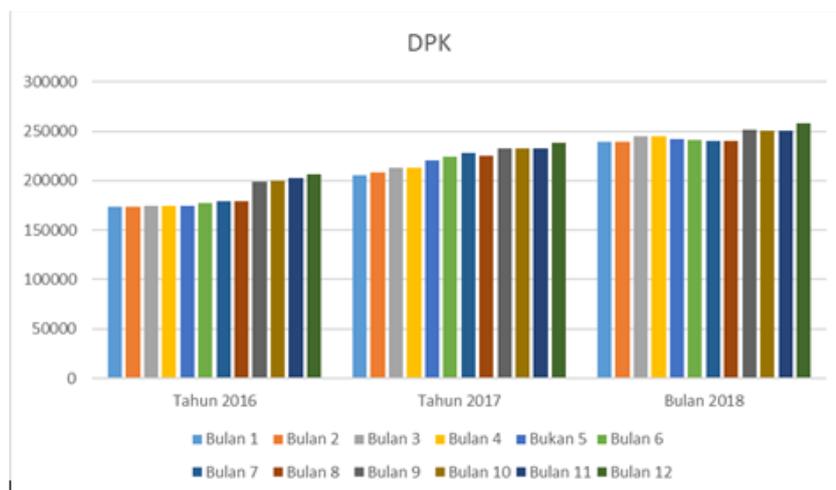
<sup>14</sup> <https://www.btpnsyariah.com/web/guest/profil>, diakses pada 20 April 2020 pukul 16.01

<sup>15</sup> <https://www.maybank.co.id/syariah/profil-korporasi/sejarah/>, diakses pada 20 April 2020 pukul 16.00

<sup>16</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 53

Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

**Grafik 4.1**  
**Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia**  
**tahun 2016-2018**



Berdasarkan grafik 4.1 mengenai dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah diperoleh bahwa nilai DPK selama periode 2016-2018 mengalami peningkatan. Peningkatan Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah dikarenakan kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah yang ada di Indonesia semakin tinggi. Hal tersebut mengakibatkan dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah makin meningkat.

Dari data dana pihak ketiga bulanan selama tiga tahun periode 2016-2018 tersebut dapat di deskriptifkan. Hasil analisis deskriptif variabel dana pihak ketiga

untuk data tahun 2016 sampai 2018 pada Bank Umum Syariah yang disajikan tabel berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Deskripsi Variabel Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Tahun 2016 sampai Juni 2019**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK BUS	36	173230	257606	2.17E5	27421.497
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Hasil Uji SPSS

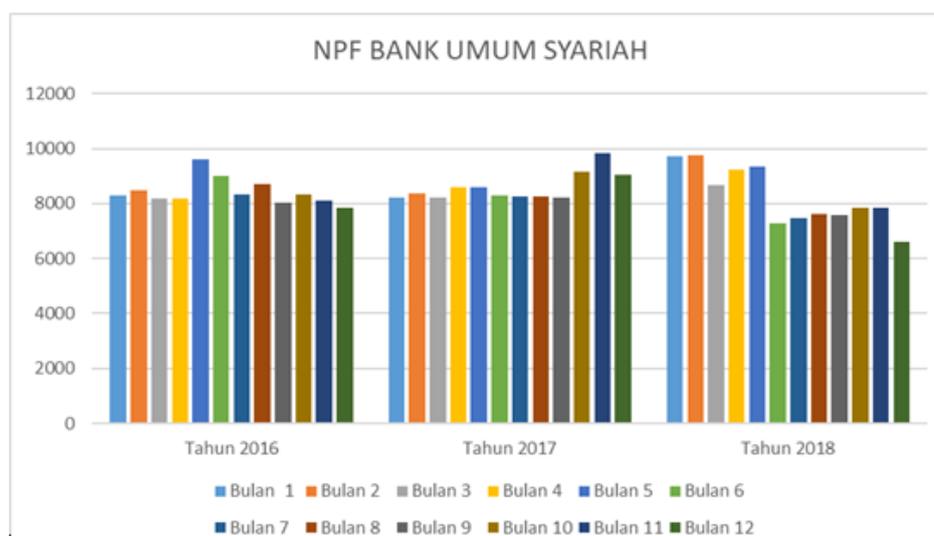
Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) DPK sebesar 2174766389 dengan nilai minimum sebesar 173230, nilai maksimum sebesar 257606, dan standar nilai devisiasinya sebesar 27421497. Nilai tersebut menunjukkan bahwa DPK mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi masih dibawah nilai rata-rata (*mean*) DPK Bank Umum Syariah ( $Mean > Std.Deviation$ ). Data tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan data tergolong kecil atau tidak terdapat data *outlier*.

## 2. *Non Performing Financing*

*Non Performing Financing* merupakan pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti: pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank; pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.<sup>17</sup> *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

**Grafik 4.2**  
***Non Performing Financing* Bank Umum Syariah di Indonesia**  
**tahun 2016-2018**



Sumber: diolah dari laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2019.<sup>18</sup>

Dari grafik di atas menunjukkan pergerakan *Non Performing Financing* bulanan pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2019. Selama tahun 2016 pergerakan *Non Performing Financing* naik turun namun pada akhir tahun 2016 *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan. Selanjutnya meningkat pada tahun 2017. Pada tahun 2018 *Non Performing Financing* mengalami naik turun, dan pada akhir tahun nilai *Non Performing Financing* semakin membaik dengan bukti grafik pada tahun 2018 semakin menurun. Penurunan *Non*

<sup>17</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial...*, hal. 475

<sup>18</sup> Statistik Perbankan Syariah, *Laporan Keuangan Bulanan*. <http://www.ojk.go.id>

*Performing Financing* pada Bank Umum Syariah disebabkan karena pembayaran pembiayaan kepada pihak bank sudah semakin membaik dan bank syariah semakin maksimal untuk menekan nilai pembiayaan bermasalah. Dari data tersebut diperoleh hasil analisis deskriptif variabel *non performing financing* untuk data tahun 2016 sampai 2018 pada Bank Umum Syariah yang disajikan tabel berikut ini.

**Tabel 4.3**  
**Deskripsi Variabel *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah Tahun 2016 sampai 2018**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NPF BUS	36	6597	9815	8420.97	721.304
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2020

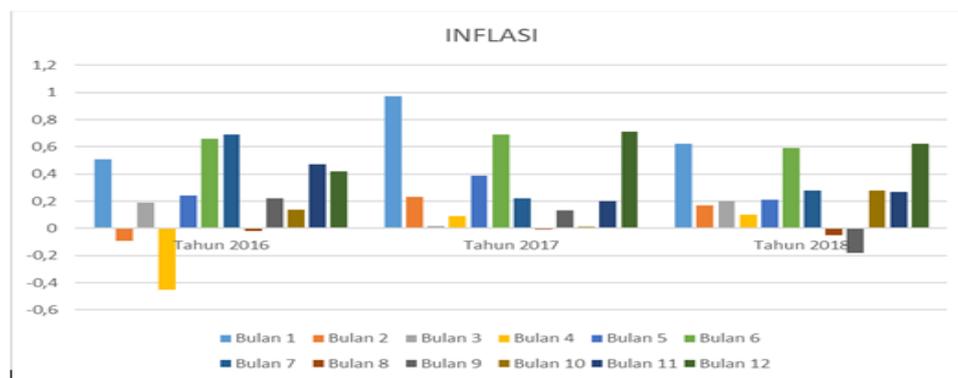
Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) NPF sebesar 8420.97 dengan nilai minimum sebesar 6597, nilai maksimum sebesar 9815, dan standar nilai devisiasinya sebesar 721304. Berdasarkan data tersebut menunjukkan perbedaan yang besar antara nilai. Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi masih dibawah nilai rata-rata (*mean*) NPF Bank Umum Syariah ( $Mean > Std.Deviation$ ). Data tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan data tergolong kecil atau tidak terdapat data *outlier*.

### 3. Inflasi

Kecenderungan kenaikan harga secara terus menerus dapat dipastikan sebagai penyebab inflasi dimana kondisi perekonomian masyarakat diposisi yang tidak seimbang diantara pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, dari kenaikan harga yang relatif cepat dan dalam jangka yang relatif panjang berdampak pada minat masyarakat

untuk melakukan pembiayaan baik di Bank Umum Syariah maupun lembaga keuangan lain dan berakibat pada kemampuan lembaga keuangan untuk memenuhi pembiayaan yang diajukan nasabah pada Bank Umum Syariah. Inflasi di Indonesia pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

**Grafik 4.3**  
**Inflasi Bank Umum Syariah di Indonesia**  
**tahun 2016-2018**



Sumber: diolah dari inflasi Indonesia tahun 2016-2018 (website Badan Pusat Statistik Indonesia)

Dari grafik 4.3 diatas menunjukkan bahwa inflasi Indonesia tertinggi terjadi pada bulan januari tahun 2017. Tingginya inflasi tersebut disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku. Inflasi terendah pada periode ini adalah saat bulan april tahun 2016, penurunan ini disebabkan oleh adanya koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dengan daerah sehingga mampu menjaga stabilitas harga bahan baku. Dari data inflasi tersebut diperoleh hasil analisis deskriptif variabel inflasi untuk data tahun 2016 sampai 2018 pada Bank Umum Syariah yang disajikan tabel berikut ini.

**Tabel 4.3**  
**Deskripsi Variabel Inflasi di Indonesia Tahun 2016 sampai 2018**

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INFLASI INDONESIA	36	-.45	.97	.2678	.29808
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) Inflasi sebesar 0.2678 dengan nilai minimum sebesar -0.45, nilai maksimum sebesar 0.97, dan standar nilai deviasinya sebesar 0.29808. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Inflasi mengalami peningkatan bulan terakhir pada periode ini. Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi masih dibawah nilai rata-rata (*mean*) Inflasi Bank Umum Syariah ( $Mean > Std.Deviation$ ). Data tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan data tergolong kecil atau tidak terdapat data *outlier*.

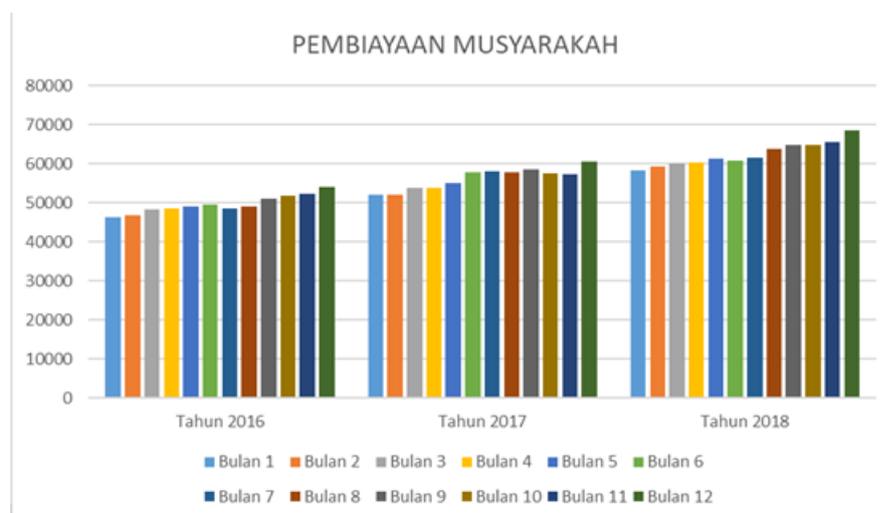
#### 4. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>19</sup> Pembiayaan dengan pola bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah, Bank dan nasabah saling menyatukan modal untuk membiayai suatu usaha yang dijalankan nasabah. Prinsip dalam pelaksanaan bagi hasil adalah cash basic, yaitu semua pendapatan yang dibagi dihasilkan adalah pendapatan yang diterima setelah diterimanya pembiayaan dari Bank, meskipun pendapatan tersebut kemungkinan diperoleh dari modal kerja yang bukan berasal dari Bank. Hal ini dilakukan sebagaimana Bank juga

<sup>19</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,....* hlm. 67

tidak akan menerima bagi hasil pada saat pembiayaan telah lunas, meskipun masih ada pendapatan yang akan diterima yang bersumber dari modal kerja Bank.<sup>20</sup> Data pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah di Indonesia bulanan disajikan dalam grafik 4.4 berikut ini.

**Grafik 4.4**  
**Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah di Indonesia**  
**tahun 2016-2018**



Sumber: diolah dari laporan keuangan bank umum syariah di Indonesia periode 2016-2019.<sup>21</sup>

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah di Indonesia selama periode penelitian ini mengalami kenaikan yang cukup drastis. Naiknya pembiayaan musyarakah tersebut dikarenakan makin banyaknya masyarakat yang mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Hal

<sup>20</sup> Ibid..., hlm. 77-78

<sup>21</sup> Statistik Perbankan Syariah, *Laporan Keuangan Bulanan*. <http://www.ojk.go.id>

tersebut karena kepercayaan nasabah terhadap bank syariah sudah semakin tinggi. Hasil analisis deskriptif variabel pembiayaan musyarakah untuk data tahun 2016 sampai 2018 pada Bank Umum Syariah yang disajikan tabel berikut ini.

**Tabel 4.4**  
**Deskripsi Variabel Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah Tahun 2016**  
**sampai 2018**

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BUS	36	46202	68652	5.61E4	5930.242
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) pembiayaan musyarakah sebesar 56075,9444 dengan nilai minimum sebesar 46202, nilai maksimum sebesar 68652, dan standar nilai deviasinya sebesar 5930242. Berdasarkan data dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai standar deviasi masih dibawah nilai rata-rata (*mean*) pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah ( $Mean > Std.Deviation$ ). Data tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan data tergolong kecil atau tidak terdapat data *outlier*.

## C. Pengujian Hipotesis

### 1. Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Untuk menguji data yang berdistribusi normal, akan digunakan alat uji normalitas yaitu *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test* dengan tingkat signifikan 5%. Data dikatakan berdistribusi normal apabila angka sprobabilitasnya lebih dari 0,05, dan sebaliknya data dikatakan tidak normal apabila angka probabilitasnya kurang dari 0,05. Berikut tabel hasil perhitungannya:

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Normalitas dengan *One Sampel Kolmogorov Smirnov Test***

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		NPF BUS	DPK BUS	INFLASI INDONESIA	PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BUS
N		36	36	36	36
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	8420.97	2.17E5	.2678	56075.94
	Std. Deviation	721.304	2.741E4	.29808	5930.242
Most Extreme Differences	Absolute	.150	.151	.150	.111
	Positive	.150	.142	.150	.103
	Negative	-.113	-.151	-.082	-.111
Kolmogorov-Smirnov Z		.899	.905	.902	.667
Asymp. Sig. (2-tailed)		.395	.386	.390	.766

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2020

Pada tabel *One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test* diatas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* untuk  $X_1$  DPK sebesar 0,386,  $X_2$  NPF sebesar 0,395,  $X_3$  Inflasi sebesar 0,390 dan Y (Pembiayaan Muayarakah) sebesar 0,766. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal karena nilai signifikan  $> 0,05$ .

#### b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. **Tabel 4.6**

**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>a</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.974 <sup>a</sup>	.949	.944	1398.611	.900

a. Predictors: (Constant), INFLASI INDONESIA, NPF BUS, DPK BUS

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BUS

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan tabel 4.6 diatas petunjuk dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yang kedua yaitu dengan melihat besarnya Durbin-Watson yaitu:

- 1) Angka DW dibawah -2 terdapat autokorelasi positif.
- 2) Angka DW -2 sampai +2 tidak terdapat autokorelasi.
- 3) Angka DW diatas -2 terdapat autokorelasi negatif.

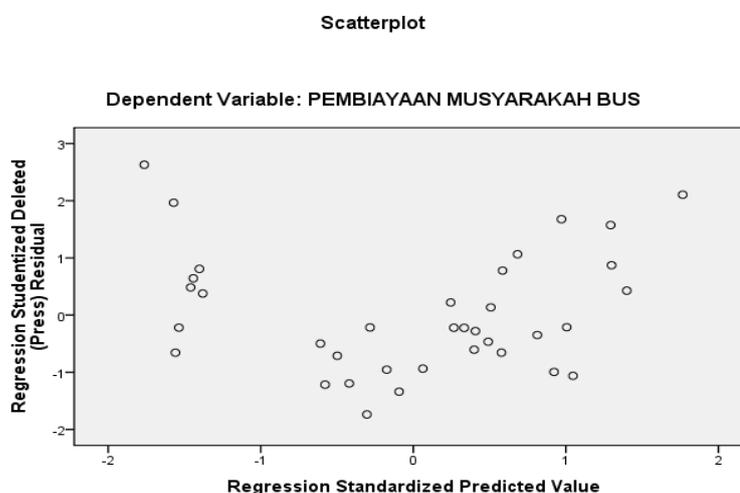
Dari hasil output diatas dapat dilihat bahwa angka DW (Durbin Watson) sebesar 0,900. Hal ini berarti tidak ada autokorelasi.

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola grafik scatterplot. Tidak terdapat heteroskedastisitas apabila:

- 1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0.
- 2) Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik tidak berpola.

**Gambar 4.5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan gambar 4.5 dari pola *Scatterplot* diatas menunjukkan hasil output SPSS gambar *scatterplot* didapatkan titik-titik menyebar dibawah dan diatas sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar diatas menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

a. Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
NPF BUS	.981	1.019
DPK BUS	.980	1.020
INFLASI INDONESIA	.997	1.003

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BUS

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2020

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa VIF untuk Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah sebesar 1,020, VIF pada *Non Performing Financing* sebesar 1,019 dan VIF pada Inflasi Indonesia sebesar 1,003. Dengan demikian ketigal variabel tersebut kurang dari 10 maka bebas dari masalah multikolinieritas dikarenakan nilai VIF pada variabel DPK, NPF, dan inflasi lebih kecil dari 10, jadi data penelitian ini layak untuk digunakan.

### 1. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis regresi linier berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara sendiri-sendiri (*parsial*) maupun bersama-sama (*simultan*) antara variabel bebas (*bargaining power* dan pendapatan anggota) dengan variabel terikat (penentuan nisbah bagi hasil). Secara ringkas hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21424.036	3586.337		5.974	.000
	NPF BUS	-1.159	.331	-.141	-3.504	.001
	DPK BUS	.205	.009	.946	23.494	.000
	INFLASI INDONESIA	-361.898	794.122	-.018	-.456	.652

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BUS

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji regresi linear berganda diatas  
maka dapat diperoleh hasil persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 21424,036 + 0,205 (DPK) + (-1,159) (NPF) + (-361,898) (INFLASI)$$

Dimana:

Y = Pembiayaan Musyarakah

a = Konstanta

X<sub>1</sub> = DPK

X<sub>2</sub> =NPF

X<sub>3</sub> = INFLASI

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub> = Koefisien garis regresi

e = *error* atau variabel pengganggu

Penjelasan dari fungsi regresi linear berganda di atas adalah sebagai  
berikut:

- a. Konstanta sebesar 21424,036 artinya apabila dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan inflasi tidak ada, maka pembiayaan musyarakah sebesar 21424,036 satuan.

- b. Koefisien regresi  $X_1$  (dana pihak ketiga) sebesar 0,205 artinya apabila dana pihak ketiga meningkat dengan satu satuan maka pembiayaan musyarakah akan meningkat sebesar 0,205 satuan, dengan asumsi variabel selain dana pihak ketiga dianggap tetap atau konstan.
- c. Koefisien regresi  $X_2$  (*non performing financing*) sebesar -1,159 artinya apabila *non performing financing* meningkat dengan satu satuan maka pembiayaan musyarakah akan menurun sebesar -1,159 satuan, dengan asumsi variabel selain *non performing financing* dianggap tetap atau konstan.
- d. Koefisien regresi  $X_3$  (inflasi) sebesar -361,898 artinya apabila inflasi meningkat dengan satu satuan maka pembiayaan musyarakah akan menurun sebesar -361,898 satuan, dengan asumsi variabel selain *non performing financing* dianggap tetap atau konstan.

Tanda (+) menandakan arah hubungan yang searah, sedangkan tanda (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen, dimana jika t hitung lebih besar dari t tabel maka dikatakan signifikan, begitu juga sebaliknya.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21424.036	3586.337		5.974	.000
	NPF BUS	-1.159	.331	-.141	-3.504	.001
	DPK BUS	.205	.009	.946	23.494	.000
	INFLASI INDONESIA	-361.898	794.122	-.018	-.456	.652

a. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BUS

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2020 Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Musyarakah

Dari tabel 4.9 *coefficient* diatas nilai signifikansi untuk variabel DPK sebesar 0,000, dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak berarti bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah. Jadi hipotesis 1 teruji. Atau, dalam tabel *coefficient* diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,03011 (diperoleh dengan cara mencari nilai  $df = n - k = 36 - 3 = 33$ , dan nilai  $\alpha = 5\%$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 23,494. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $23,494 > 2,03011$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah. Jadi hipotesis 1 teruji.

#### 1) Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Musyarakah

Dari tabel 4.9 *coefficient* diatas nilai signifikansi untuk variabel NPF sebesar 0,01, dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $0,01 < 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak berarti bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah. Jadi hipotesis 2 teruji. Atau, dalam tabel *coefficient* diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,03011 (diperoleh dengan cara mencari nilai  $df = n - k = 36 - 3 = 33$ , dan nilai  $\alpha = 5\%$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3,504. Karena nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $-3,504 > 2,03011$ , maka dapat

disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah. Jadi hipotesis 2 teruji.

## 2) Pengaruh inflasi terhadap Pembiayaan Musyarakah

Dari tabel 4.9 *coefficient* diatas nilai signifikansi untuk variabel inflasi sebesar 0,652, dibandingkan dengan taraf signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) maka  $0,652 > 0,05$ . Dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah Bank Umum Syariah.. Atau, dalam tabel *coefficient* diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2,03011 (diperoleh dengan cara mencari nilai  $df = n - k = 36 - 3 = 33$ , dan nilai  $\alpha = 5\%$ ) dan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,456. Karena nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,456 < 2,03011$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima yang berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah Bank Umum Syariah.

## b. Uji Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui koefisien secara keseluruhan. Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara DPK, NPF dan inflasi terhadap Pembiayaan Musyarakah. Adapun hasil pengujian dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Parsial (Uji F)**

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.168E9	3	3.894E8	199.081	.000 <sup>a</sup>
	Residual	6.260E7	32	1956112.777		
	Total	1.231E9	35			

a. Predictors: (Constant), INFLASI INDONESIA, NPF BUS, DPK BUS

b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BUS

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2020

Dari tabel 4.10 anova diatas diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 199,081. Dan  $F_{tabel}$  2,89 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0.000. Jadi, apabila  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  yaitu  $199,081 > 2,89$ , maka hipotesis penelitian adalah signifikan. Secara bersama-sama DPK, NPF dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Musyarakah. Artinya menerima hipotesis ke 4.

c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui DPK ( $X_1$ ), NPF ( $X_2$ ) dan Inflasi ( $X_3$ ) terhadap Pembiayaan Musyarakah ( $Y$ ). Nilai koefisien determinasi diantara 0 sampai 1. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai *adjusted R square*.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson

**Tabel**

1	.974 <sup>a</sup>	.949	.944	1398.611	.900
---	-------------------	------	------	----------	------

**4.11**  
**Hasil**  
**Uji**

a. Predictors: (Constant), INFLASI INDONESIA, NPF BUS, DPK BUS  
b. Dependent Variable: PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BUS

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Sum

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 16.0, 2020

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat disimpulkan bahwa angka *R Square* atau koefisien determinasi adalah 0,949 sedangkan untuk regresi linear berganda yang digunakan adalah yang tertulis dalam *Adjusted R Square* sebesar 0,944, bahwa variabel DPK, NPF dan Inflasi secara bersama-sama mempengaruhi Pembiayaan Musyarakah sebesar 94,4%, sedangkan sisanya sebesar (100% - 94,4% = 5,6%) dipengaruhi oleh sebab-sebab lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.